

LAPORAN NOTULA

Pembahasan Usulan Proposal Isu Strategis Inclusive Public Services: Akuntabilitas New DTKS yang Inklusif

Senin, 7 November 2022 | 14.00 – 15.00

PENDAHULUAN

Sekretariat Open Government Indonesia sedang melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Nasional OGI VII Tahun 2023-2024. Salah satu aksi yang diusulkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berkaitan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sekretariat Open Government Indonesia memfasilitasi pertemuan antara OMS dengan K/L terkait, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) guna memberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait aksi DTKS yang ingin didorong dalam RAN OGI VII Tahun 2023-2024.

TUJUAN

1. Pendalaman aksi terkait Akuntabilitas Data DTKS dari OMS
2. Mengadvokasikan agenda kokreasi antara K/L dengan OMS dalam rangka aksi Akuntabilitas Data DTKS RAN OGI VII 2023-2024.

PEMBAHASAN

1. **Theodorus Agustinus H.** Mewakili Sekretariat Open Government Indonesia memberikan pengantar terkait agenda Kokreasi RAN OGI VII sebagai berikut.
 - a. Sekretariat Open Government Indonesia merupakan sekretariat yang dibuat dalam rangka berpartisipasinya Indonesia dalam kesepakatan multilateral, yaitu Open Government Partnership. Sekretariat Open Government Indonesia memiliki lima nilai yang didorong dalam praktiknya, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi dan inklusivitas.
 - b. Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024, Sekretariat OGI membuka kesempatan bagi OMS untuk memberikan usulan aksi, salah satu aksi yang diusulkan oleh OMS adalah Akuntabilitas Data DTKS. Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dalam rangka meningkatkan mekanisme pendataan DTKS dan juga optimalisasi penggunaan data DTKS.
2. **Bapak Darwanto** dari Media Link, selaku pengusul memberikan penjelasan terkait aksi yang diusulkannya sebagai berikut:
 - a. Aksi mengenai DTKS merupakan aksi lanjutan setelah Kementerian Sosial telah mengembangkan portal DTKS. Namun terdapat temuan dari Media Link, bahwa terdapat data dari kelompok-kelompok marjinal yang belum termasuk dalam sistem DTKS. Selain itu, terkait dengan inclusion dan exclusion eror terkait dengan data-data kesejahteraan sosial juga menjadi salah satu catatan yang perlu diperhatikan dan juga diselesaikan dalam RAN OGI VII. Hal ini menjadi salah satu catatan yang akan didorong untuk diselesaikan dalam RAN OGI VII.
 - b. Selain itu, desain aplikasi DTKS yang saat ini dimiliki oleh Kementerian Sosial belum mudah diakses. Hal tersebut didasarkan pada temuan yang biasa digunakan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan akses terkait DTKS.

3. **Bapak Broto**, dari Biro Perencanaan Kementerian Sosial memberikan tanggapan atas usulan proposal rekan-rekan CSO, sebagai berikut:
 - a. Data terkait Disabilitas sudah terdata, tetapi yang didata hanya data disabilitas yang masuk dalam kategori miskin. Terkait dengan akses aplikasi usul-sanggah, hal ini menjadi menarik agar data dapat diakses, tidak hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki disabilitas, tetapi bisa untuk seluruh golongan.
 - b. Terkait aplikasi SIKS-NG telah dapat update dari rekan-rekan Pejuang Muda untuk update data kemiskinan dan juga verifikasi lapangan, yang pada akhirnya datanya masuk dalam data SIKS NG. Terkait dengan geo tagging juga dilakukan melalui perkembangan aplikasi SIKS-NG.
 - c. Output dari SIKS-NG nanti akan digunakan dalam DTKS, yang datanya akan di update dalam Keputusan Menteri Sosial yang akan dilakukan setiap bulannya hasil dari pemadanan dengan Kementerian Dalam Negeri. Untuk BPJKN dilakukan pembaharuan setiap bulan dengan melakukan pemadanan data dengan BPJS. Terkait dengan aksesibilitas data SIKS-NG terbatas hanya pada aparat desa.
 - d. Data yang ada pada DTKS saat ini fokus untuk miskin saja, apabila ada kelompok rentan, itu hanya kelompok rentan yang masuk dalam kategori miskin.
 - e. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan tahun 2023, rekan-rekan OMS juga dapat ikut terlibat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi DTKS. Rencananya Pusdatin akan melaksanakan Monev juga tahun depan untuk melihat implementasi pemanfaatan data DTKS.
4. **Bapak Darwanto** dari Media Link memberikan tanggapan lainnya terkait usulan proposal yang dimilikinya sebagai berikut:
 - a. Tantangan lain yang membutuhkan keterlibatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terdapat pada peristiwa kependudukan. Perlu dilakukan pemadanan agar data-data peristiwa kependudukan tersebut dapat diperbaharui secara berkala. Namun tantangannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terkait peristiwanya tersebut.
5. **Ibu Rosinta** dari Direktorat PKPM memberikan tanggapan terkait dengan pengembangan DTKS kedepannya sebagai berikut:
 - a. Melalui kegiatan Regsosek, harapannya data-data kependudukan terkini dapat dimiliki. Selanjutnya rekan-rekan Kementerian Sosial akan melakukan pendataan terkait dengan kelompok sosial dengan kategori miskin.
 - b. Setelah Regsosek juga akan terdata terkait kerentanan dari setiap kelompok rentan yang nantinya pengembangannya akan dipertimbangkan mengenai integrasi sampai dengan pengelompokan kelompok rentan kedepannya. Namun hal tersebut masih dalam pengembangan. Setelah dilakukannya pengelompokan ini, maka terkait dengan intervensi kebijakan dari setiap stakeholders dapat semakin terpetakan dan juga dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - c. Diskusi selanjutnya diharapkan Pusdatin juga bisa hadir supaya diskusi dapat dilaksanakan secara komprehensif kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Sosial, maka rekan-rekan Organisasi Masyarakat Sipil akan mempertajam terkait dengan usulannya melalui matriks RAN OGI. Selanjutnya akan dikirimkan surat kepada Pusdatin untuk memberikan tanggapan tertulis lebih lanjut mengenai DTKS.

Dokumentasi

